

## Kemampuan dan kinerja keuangan provinsi kalimantan

**Soeharjoto**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia.

Email: ryoto16@yahoo.com

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan desentralisasi fiskal di Kalimantan, yang diperoleh dari peta kemampuan keuangan daerah dan indeks kinerja keuangan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Provinsi Kalimantan berada di kuadran kedua dan ketiga yang berarti tidak ideal. Untuk Kalimantan Selatan dan Utara menunjukkan bahwa indeks kinerja keuangan daerah memiliki pola hubungan konsultatif tetapi untuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur memiliki pola hubungan partisipatif.

**Kata Kunci:** berbagi; pertumbuhan; elastisitas; peta kemampuan keuangan daerah; indeks kinerja keuangan

### ***Financial Capability and Performance of the Province of Kalimantan***

#### ***Abstrak***

*Purpose of this study is to determine the readiness of fiscal decentralization at Kalimantan, which obtained from regional financial capability maps and financial performance index with descriptive methods. Results shown that Kalimantan Province financial capabilities are in second and third quadrant which means it is not ideal. For South and North Kalimantan shown that regional financial performance index has a consultative relationship pattern but for Central Kalimantan, West Kalimantan and East Kalimantan has a participatory relationship pattern.*

**Keywords:** share; growth; elasticity; regional financial capability maps; financial performance index

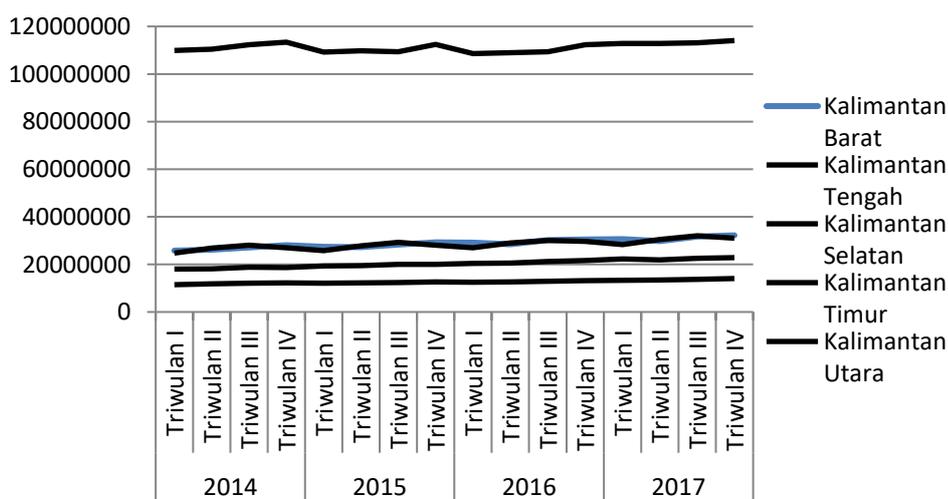
## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pembangunan ekonomi pra otonomi daerah dilakukan secara sentralisasi, namun berdampak pada semakin bergantungnya pemerintah daerah terhadap pusat (Mardiasmo, 2002). Ketergantungan ini, terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutupi biaya belanja daerah, dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang ditunjang dengan subsidi dan bantuan pusat yang semakin membesar. Hal ini, terejadi karena pemerintah daerah kehilangan keleluasaan melakukan tindakannya (local discretion), terutama dalam pengambilan keputusan penting, yang disebabkan semakin banyaknya intervensi dari pemerintah pusat terhadap daerah (Kuncoro, 2004). Adanya kesadaran bahwa pembangunan merupakan proses yang kompleks dan tidak adanya kepastian serta sulit untuk dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan terobosan yakni dengan memberlakukan desentralisasi.

Kebijakan otonomi keuangan daerah, akhirnya dilaksanakan pada 2001, yang berlandaskan pada undang-undang No. 25 Tahun 1999. Undang-undang ini terus diperbaharui, yang akhirnya akan membawa perubahan yang mendasar mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Kondisi ini, didukung pula dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang berdampak pada semakin dituntutnya peran kemandirian dari pemerintah daerah. Adapun caranya, daerah perlu menggali dan mengembangkan potensi daerah sebagai sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk pembiayaan daerahnya (Rahayuanti, 2018).

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau yang terbesar di Indonesia dan memiliki kondisi yang unik. Kalimantan merupakan pulau yang dimiliki tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Peluang Provinsi Kalimantan dalam mengembangkan ekonominya menjadi lebih terbuka karena bersebelahan dengan dua negara yang secara ekonomi mapan. Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan daerah, akhirnya pada 25 Oktober 2012, Kalimantan dimekarkan lagi dengan dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara, yang berbatasan dengan Sabah dan Serawak, dengan demikian Provinsi Kalimantan memiliki lima wilayah, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan dan Kalimantan Utara.

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah. Adanya PDRB yang tinggi mencerminkan adanya kesejahteraan yang tinggi. Rata-rata PDRB Provinsi Kalimantan pada 2014-2017 sebesar Rp. 40.308.096 juta. Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki PDRB yang tertinggi di atas rata-rata, bila dibandingkan dengan daerah lainnya, yakni sebesar Rp. 111.165.025 juta. PDRB yang berada dibawahnya yang juga di bawah rata-rata, yakni meliputi Kalimantan Selatan (Rp. 28.452.743 Juta), Kalimantan Tengah (Rp. 20.380.630 Juta), Kalimantan Barat (Rp. 28.872.618 Juta), dan Kalimantan Utara (Rp. 12.669.459 Juta).



Gambar 1. PDRB Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Pada 2014-2017 (Rp. Juta)

Sumber: BPS

Indikator PDRB akan lebih bermakna bila dikaitkan dengan distribusi pendapatan yang akan diterima masyarakat, yakni dalam bentuk upah minimum regional (UMP). UMP merupakan pendapatan riil yang diterima masyarakat dalam aktivitas ekonominya, sehingga dengan memperoleh UMP yang tinggi kesejahteraan masyarakatnya akan semakin baik. Rata-rata UMP Kalimantan terus mengalami peningkatan, yang pada 2015 sebesar Rp. 1898,83 ribu, kemudian meningkat menjadi Rp. 2.039 ribu pada 2016, dan pada 2017 naik lagi menjadi Rp. 2.153,17 ribu. Kalimantan Barat memiliki UMP yang paling rendah dari 2015-2017, Pada 2015 UMP tertinggi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, kemudian pada 2016 Kalimantan Utara, dan pada 2017 menjadi Kalimantan Timur.

Tabel 1. Rata-Rata Upah UMP di Provinsi Kalimantan Pada 2015-2017 (Rp. Ribu)

Provinsi	2015	2016	2017
Kalimantan Barat	1560	1739	1883
Kalimantan tengah	1896	2058	2227
Kalimantan Selatan	1870	2085	2258
Kalimantan Timur	2026	2161	2359
Kalimantan Utara	2026	2175	2175

Sumber: BPS

Rostow (1960), mengungkapkan bahwa dalam pembangunan ekonomi memiliki beberapa tahapan, dengan demikian agar terjadi peningkatan tahapan pembangunan diperlukan pengeluaran pemerintah, yang ditunjang dengan pendapatan daerahnya. Desentralisasi dalam dimensi fiskal merupakan pengaturan kembali pengeluaran, penerimaan, dan transfer fiskal antar tingkatan penerimaan, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja keuangan, yang dilakukan melalui peningkatan penerimaan dan pengeluaran yang rasional (Rondinelli, 1990). Derajat desentralisasi fiskal dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah melalui PAD (Musgrave, 1989). Sumber pendapatan pokok daerah yang ideal dijadikan sumber pokok pendapatan daerah adalah PAD (Kaho, 1997).

Penelitian peta kemampuan keuangan daerah dan indeks kinerja keuangan (IKK) telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil sebagian besar masih banyak daerah yang belum siap membiayai belanja daerahnya secara mandiri. Penelitian Farhani (2018), mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan kota Cirebon masuk dalam kategori belum ideal tetapi memiliki potensi lokal, dengan IKK yang masuk kategori tinggi yang disebabkan adanya subsidi dari dana perimbangan dari pusat. Haryanto (2017), dengan hasil share daerah penghasil SDA memiliki potensi yang lebih besar dari yang non SDA dan growth non SDA lebih besar dari pada SDA. Hidayat, dkk (2016), hasilnya adalah peningkatan growth PAD tidak diikuti peningkatan share PAD untuk belanja, sehingga terindikasi adanya ketergantungan terhadap pemerintah pusat, yang IKK-nya terjadi pergeseran kearah yang lebih baik. Haji, dkk (2015), mengungkapkan bahwa terdapat penurunan share, growth, dan IKK pasca pemekaran provinsi yang disebabkan kurangnya infrastruktur pelayanan publik untuk daerah perbatasan dan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Dethan (2015), mengungkapkan bahwa peta kemampuan keuangan di Prov. NTB mempunyai IKK tinggi, sedang dan rendah, dengan pola hubungan dua daerah partisipatif dan lainnya konsultatif. Susanto (2014), menemukan bahwa Kemampuan keuangan Provinsi NTB pada 2003-2007 memiliki share yang rendah dan growth yang tinggi, tetapi apabila dibandingkan dengan peningkatan belanja daerah untuk peningkatan proporsi PAD sangat kecil, tetapi apabila dilihat dari tingkat kemampuan keuangan daerahnya dengan kemampuan keuangan yang tinggi. Muzdalifah (2013), menemukan bahwa sebanyak 6,58 persen kemandirian daerah masih bergantung pada pemerintah pusat, dengan IKK yang otonomi secara keuangan belum mampu mandiri. Samora (2010), dengan hasil pemetaan kinerja keuangan Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali otonomi daerah belum berhasil karena 72 persen masih termasuk daerah yang tidak mandiri.

Keberhasilan pembangunan dengan menggunakan sistem desentralisasi bergantung pada kesiapan daerah dalam menghimpun dana. Peningkatan pembangunan akan dapat tercapai dengan melakukan mengalokasikan dana untuk sektor riil dan tidak terjadinya asymmetric information, yang

akan memberikan multiplier effect yang baik (Soeharjoto, 2018). Dalam pelaksanaan pembangunan di perlukan juga strategi pemasaran agar masyarakat tertarik dan mau terlibat, tetapi perlu juga memperhatikan kelestarian lingkungannya (Arafah, 2018). Adanya investasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, akan menyebabkan dalam pengelolaan aset akan memberikan kontribusi yang tidak optimum, sehingga pihak yang terkait perlu melakukan perbaikan SDM-nya (Usman, 2018). Otonomi daerah di Kalimantan agar dapat berjalan dengan baik, perlu diketahui kesiapan desentralisasi fiskal melalui pemetaan dan kemandirian keuangan daerah. Adanya peta kemampuan keuangan daerah dan indeks kinerja keuangan akan mempermudah perencanaan Provinsi Kalimantan dalam melaksanakan pembangunan yang sustainable. Agar dapat diketahui kemampuan fiskalnya secara riil, dalam penelitian ini lebih menekankan pada kemampuan daerahnya sendiri, yakni melalui PAD.

## METODE

Penelitian peta kemampuan keuangan dan kinerja keuangan di Provinsi Kalimantan, menggunakan metode deskriptif dengan membuat peta kemampuan keuangan dan indeks kemandirian keuangan. Data yang digunakan data sekunder dari 2014-2017, yang berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan, Republik Indonesia.

Prosedur peta kemampuan keuangan daerah dan indeks kemampuan keuangan daerah, dilakukan dengan:

Mencari growth, share, dan Elastisitas. Growth merupakan angka pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Share merupakan seberapa jauh kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pelayanan publik. Elastisitas merupakan seberapa besar elastisnya perkembangan pembangunan. Adapun caranya dengan formula:

$$\text{Share} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{pendapatan Asli Daerah (t)}}{\text{Pendapatan asli Daerah (t-1)}} \times 100$$

$$\text{Elastisitas} = \frac{\text{Belanja Langsung}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

Untuk memperoleh peta keuangan daerah menggunakan metode kuadran. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan dengan memperhatikan posisi Provinsi Kalimantan. Bappenas (2003), menginterpretasikannya berdasarkan:

- Kuadran 1 :Paling ideal, dengan growth dan share yang tinggi.
- Kuadran 2 :Belum ideal, dengan growth tinggi dan share rendah.
- Kuadran 3 :Belum ideal, dengan share yang tinggi dan growth rendah.
- Kuadran 4 :Tidak ideal, dengan share dan growth yang rendah.

Prosedur menyusun indeks kemampuan keuangan daerah dengan:

Mencari indeks share, growth, dan elastisitas. Adapun formulanya:

$$\text{Indeks Share} = \frac{\text{Nilai Share hasil Pengukuran} - \text{Nilai Share Minimum}}{\text{Nilai Share maksimum} - \text{Nilai Share minimum}} \times 100$$

$$\text{Indeks Growth} = \frac{\text{Nilai Growth hasil Pengukuran} - \text{Nilai Growth Minimum}}{\text{Nilai Growth Maksimum} - \text{Nilai Growth Minimum}} \times 100$$

$$\text{Indeks Growth} = \frac{\text{Nilai Elastisitas Pengukuran} - \text{Nilai Elastisitas Minimum}}{\text{Nilai Elastisitas Maksimum} - \text{nilai Elastisitas Minimum}} \times 100$$

Kemudian mencari indeks kapasitas keuangan. Adapun formulanya adalah:

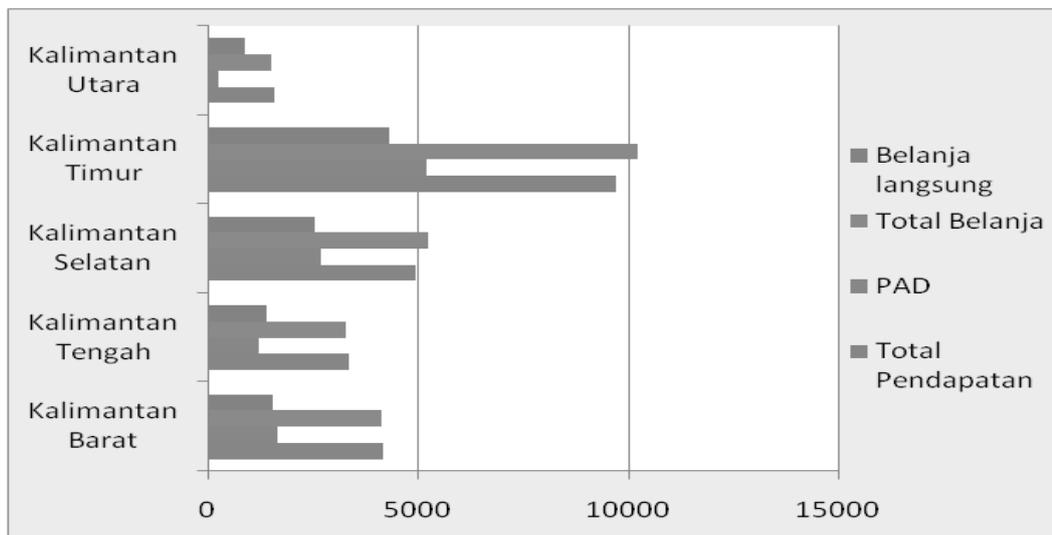
$$\text{IKK} = \frac{\text{Indeks Share} + \text{Indeks growth} + \text{Indeks Elastisitas}}{3}$$

Intepretasi pola hubungan dan tingkat kemampuan yang menggunakan indeks kapasitas keuangan dengan membagi empat bagian (Kepmendagri No. 690.9000.327 Tahun 1996). Adapun pembagiannya adalah:

- 0-25 persen :Kemampuan keuangan rendah sekali dengan pola hubungan Instruktif.
- 26-50 persen :Kemampuan keuangan rendah dengan pola hubungan konsultatif.
- 51-75 persen :Kemampuan keuangan sedang dengan pola hubungan partisipatif.
- 76-100 persen :Kemampuan keuangan tinggi dengan pola hubungan delegatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peta potensi keuangan daerah dan indeks keuangan daerah, menggunakan data pendapatan dan pengeluaran daerah, baik secara total dan pendapatan asli daerah, serta belanja langsungnya. Untuk Provinsi Kalimantan penerimaan dan pengeluaran daerah yang terbesar di dominasi Kalimantan Timur dan yang paling rendah Kalimantan Utara. Rata-rata pendapatan total Provinsi Kalimantan Rp. 9.705 milyar, dengan nilai maksimum di Kalimantan Timur Rp. 9.705 milyar dan minimum di Kalimantan Utara 1.583 milyar. PAD dengan rata-rata Rp. 2.209,4 milyar dengan nilai maksimum di Kalimantan Timur Rp. 5.223 milyar dan minimal di Kalimantan Utara Rp. 275 milyar. Belanja totalnya dengan rata-rata 4.885,2 milyar dengan nilai maksimum di Kalimantan Timur Rp. 10.217 milyar dan minimum di Kalimantan Utara Rp. 275 milyar. Belanja langsungnya dengan rata-rata Rp. 2.147,8 milyar dengan nilai maksimum di Kalimantan Timur Rp. 4.311 milyar dan minimum di Kalimantan Utara Rp. 897 milyar.



Gambar 2. Rata-Rata Total Pendapatan, PAD, Total Belanja, dan Belanja Langsung Provinsi Kalimantan, Pada 2013-2017 (Rp. Milyar).

Sumber: Data Hasil Olahan

Provinsi Kalimantan wilayahnya memiliki hubungan yang negatif antara share dan growth-nya. Kalimantan memiliki nilai rata-rata kemampuan kontribusi PAD terhadap total belanja (Share) sebesar 38,57 dengan nilai maksimum di Kalimantan Timur (51,82) dan minimum di Kalimantan Utara (12,53). Rata-rata kemampuan pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun (growth) 295,61 dengan nilai maksimum Kalimantan Utara (1057,87) dan minimum Kalimantan Timur (98,32).

Tabel 2. Share dan Growth di Provinsi Kalimantan pada 2013-2017

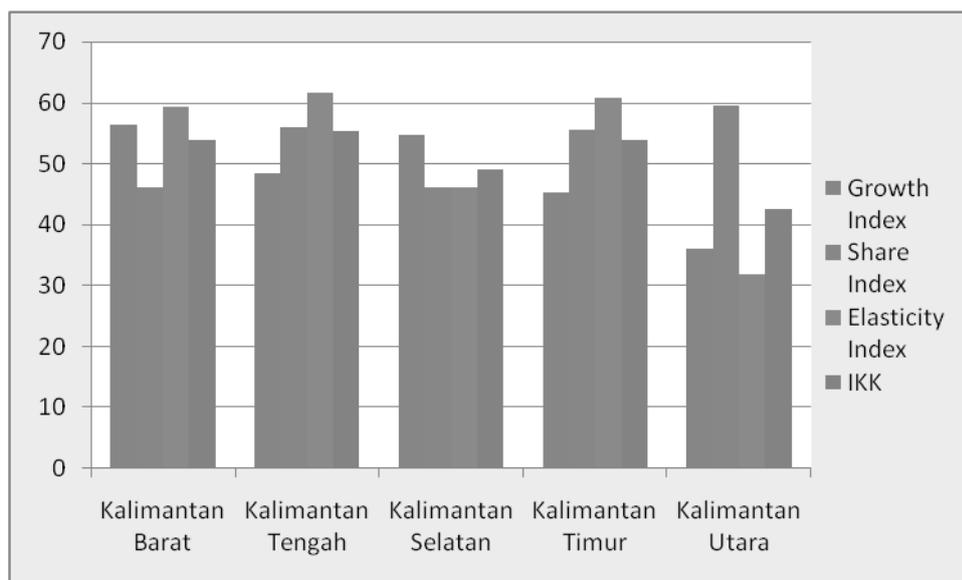
Provinsi	Share	Growth
Kalimantan Barat	40.42	111.17
Kalimantan Tengah	36.55	107.37
Kalimantan Selatan	51.54	103.32
Kalimantan Timur	51.82	98.317
Kalimantan Utara	12.53	1057.9

Sumber: Data Hasil Olahan

Peta kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran, dapat mengetahui posisi kemampuan keuangan Provinsi Kalimantan. Dari empat kuadran yang ada Kalimantan hanya memiliki dua kuadran, yakni di kuadran 2 dan 3, yang berarti masih belum ideal. Kalimantan Utara berada di kuadran 2 dengan growth yang tinggi (1.057,87) dengan share yang rendah (12,53). Wilayah lainnya berada pada Kuadran ke tiga dengan share tinggi dan growth rendah, yakni Kalimantan Timur dengan share sebesar 51.82 dan growth sebesar 98.32, Kalimantan Selatan share sebesar 51.54 dan growth

sebesar 103,32, Kalimantan Barat share sebesar 40,42 dan growth sebesar 111.18, dan Kalimantan Tengah share sebesar 36,55 dan growth sebesar 107,37.

Provinsi Kalimantan memiliki rata-rata indeks kinerja keuangan sebesar 50,922. Indeks growth sebesar 48,9 persen dengan nilai maksimum sebesar 56,44 di Kalimantan Barat dan nilai minimal 45,36 di Kalimantan Timur. Indeks share nilai rata-ratanya 52,68 dengan nilai maksimum 56,05 di Kalimantan Tengah dan nilai minimum 46,01 di Kalimantan Barat. Indeks elastisitasnya dengan rata-rata 51,89 dengan nilai maksimum 55,33 di Kalimantan Tengah dan nilai minimum 48,98 di Kalimantan Selatan.



Gambar 3. Indeks Growth, Indeks Share, Indeks Elastisitas, Indeks Kinerja Keuangan Provinsi Kalimantan Pada 2013-2017

Sumber: Data Hasil Olahan

Pola hubungan keuangan Provinsi Kalimantan masuk kategori rata-rata karena masuk kategori konsultatif dan Partisipatif. Wilayahnya sebagian besar memiliki pola hubungan keuangan yang baik berupa partisipatif, yakni Kalimantan Tengah (55,33), Kalimantan barat (53,95), dan Kalimantan Timur (53,89). Untuk dua wilayah lainnya, masuk kategori pola hubungan keuangan yang konsultatif, yakni Kalimantan Selatan (48,98) dan Kalimantan Utara. Kondisi ini berarti menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan memiliki tiga daerah yang memiliki kemampuan keuangan sedang dan dua daerah yang memiliki kemampuan keuangan rendah.

## SIMPULAN

Peta kemampuan keuangan Provinsi Kalimantan berada pada kuadran dua dan tiga, yang berarti belum ideal. Kalimantan Utara berada di kuadran dua yang memiliki growth tinggi dengan share yang rendah. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah berada pada kuadran tiga dengan share tinggi dan growth rendah. Indeks kinerja keuangan daerah Kalimantan memiliki pola hubungan yang konsultatif untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, serta partisipatif untuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan masih perlu berbenah dengan lebih inovasi dalam menggali potensi untuk meningkatkan PAD-nya, dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam serta mengembangkan sektor pariwisata dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, Willy., Lucky Nugroho, Rowlan Takaya, Soeharjoto Soekapdjo. (2018). Marketing Strategy for Renewable Energy Development In Indonesia Context Today. *International Journal of Energy Economics and Policy*. 8(5), 181-186.
- Bappenas. (2013). Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.

- 
- Dethan, Stevany Hanalya. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009-2013. *GaneÇ Swara*. Vol. 9 No.2, September, 145-151.
- Farhani, Fajar. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan dan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011-2015). *Reformasi: Jurnal Ilmiah Administrasi*. Vol. 3, No. 1, Agustus.1-18
- Haryanto, Joko Tri. (2017). Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA dan Non SDA Di Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 8, No. 2, Desember, 103-116.
- Hidayat, Muhammad., Muhammad Fikry Hadi, dan Dwi Widiarsih. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Sungkai*. Vol 4, No. 2, Agustus, 36-55.
- Haji, Adha Pramidaya., Sutrisno T., Nurkholis. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah Provinsi (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara). *International Journal of Social and Local Governance*. Vol. 1, No. 2, Oktober, 129-146.
- Hasan, Basri., Syaparuddin., Junaidi. (2013). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol 2, No. 1, 65-84.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kaho, Josef Riwu. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kepmendagri No. 690.9000.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Musgrave, Richard A Musgrave, Peggy B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. Mc Graw Hill Book Company.
- Muzdalifah. (2013). Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Otonomi Daerah. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 6, No. 1, Maret, 1-10.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahayanti, Surya., Lewi Malisan, Anisa Kusumawardani. Analisis Target dan Pajak Daerah. *Akuntabel*. 15(1), 55-66.
- Rondinelli, D. A. (1990). *Decentralization, Territorial Power and The State: A Critical Response Development and Change*. Vol. 21. 491-500.
- Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soeharjoto Soekapdjo, Lucky Nugroho, Ahmad Badawi, Wiwik Utami. (2018). Bad debt issues in Islamic bank: macro and micro influencing (Indonesia cases). *International Journal of Commerce and Finance*. Vol. 4, Issue 1, 10-26.
- Susanto, Hery. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. Vol 10, No. 1, Maret, 15-26.
- Samora, Remon. (2010). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota dan Kabupaten Se- Jawa dan Bali Tahun 2004-2008: Metode Kuadran. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*. Vol 2, No. 1, Januari, 65-84.

---

Usman, Bahtiar., Syofriza Syofyan, Lucky Nugroho, Soeharjoto. (2018). Foreign Bank Penetration And Its Impact On Banking Industries. Eurasian Journal of Economics and Finance. 6(1) 64-83.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.